

# **PARTISIPASI FEMALE PEACEKEEPER INDONESIA DALAM MISI UNITED NATIONS INTERIM FORCES IN LEBANON TAHUN 2015-2017: DAMPAK TERHADAP DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA**

## **INDONESIAN FEMALE PEACEKEEPER PARTICIPATION IN UNITED NATIONS INTERIM FORCES IN LEBANON 2015-2017: IMPACT TO INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY**

Sarah Astried<sup>1</sup>, I Gede Sumertha, KY<sup>2</sup>, Herlina Juni Risma Saragih<sup>3</sup>

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* tahun 2015-2017 dan dampaknya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia. Hal ini dihadapkan dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 Tahun 2000 tentang *Women, Peace and Security*, dan target gender 15% untuk personel militer perempuan dalam mewujudkan misi pemeliharaan perdamaian yang ramah gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 mengalami peningkatan secara kuantitas dengan jumlah 100 personel dari total 134 yang tersebar di sembilan misi. Namun, posisi penugasan *female peacekeeper* Indonesia masih mendominasi satuan tugas kontingen daripada posisi *military staff*. Untuk meningkatkan partisipasi, Indonesia masih mengalami hambatan utamanya berkaitan dengan kurang siapnya institusi militer dalam menyiapkan Wan-TNI termasuk kurangnya pendidikan dan pelatihan, aturan terkait ijin suami/atasan, dan absennya kebijakan. Akhirnya, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia berdampak terhadap *bargaining power* Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* dan membantu *capacity building* Wan-TNI dalam hal profesionalisme tugas.

**Kata Kunci:** Partisipasi, *female peacekeeper* Indonesia, UNIFIL, Diplomasi Pertahanan

*This research aims to analyze participation of Indonesian female peacekeeper in United Nations Interim Forces in Lebanon year 2015-2017 and its impact to Indonesia's defense diplomacy. It is correlated with the existence of United Nations Security Council Resolution No. 1325 year 2000 about Women, Peace, and Security, as well as gender target of 15% female military personnel to implement gender based mission. This research uses qualitative research method and descriptive analytic approach, with interview and literature study as the data collection technique. The results show that participation of Indonesian female peacekeeper year 2015-2017 are increasing in quantity with 100 personnel out of total 134 females around nine missions. However, their job positions were still dominating task forces in contingent rather in military staff position. In order to increase participation, Indonesia still experiences obstacles that mainly related to the lack of preparedness of military institution in preparing female military personnel including the lack of education and training, regulation about permit from officer and/or husband, and the absent of gender composition policy. Finally, participation of Indonesian female peacekeeper affected to Indonesia's bargaining power in conducting defense diplomacy to enhance Confidence Building Measures and help female's capacity building in term of task professionalism.*

**Keywords:** Participation, Indonesian Female Peacekeeper, UNIFIL, Defense Diplomacy

---

<sup>1</sup> Sarah Astried adalah mahasiswa program studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia. Email: sarahastried@gmail.com

<sup>2</sup> Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gede Sumertha KY, PSC., Dosen Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.

<sup>3</sup> Dr. Herlina Juni Risma Saragih, Dosen Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

## Pendahuluan

Misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan tindakan kolektif yang dilakukan dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan di dunia.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, PBB telah mengagendakan keseimbangan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal ini ditunjukkan dengan diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tahun 2000 tentang “*Women, Peace and Security*”.<sup>5</sup> Resolusi tersebut menandakan bahwa isu gender telah menjadi fokus perhatian dalam agenda perdamaian dan keamanan dunia.<sup>6</sup> Kehadirannya mengajak seluruh negara anggota PBB untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dimana fokus utamanya adalah partisipasi, proteksi, bantuan dan pemulihan. Di dalamnya juga menyinggung tentang partisipasi perempuan pada level negara seperti polisi, kepemimpinan politik, rekrutmen *military officers* dan prajurit.<sup>7</sup>

Dalam sejarahnya, perempuan pemelihara perdamaian diperkenalkan sejak tahun 1957.<sup>8</sup> Sayangnya, pasukan pemelihara perdamaian ini masih didominasi oleh laki-laki. Dalam periode 1957-1979 hanya terdapat 5 orang perempuan dari 6.250 personil. Angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 20 dari 20.000 personil militer pada tahun 1989. 1% dari personil perempuan berseragam dikerahkan di misi perdamaian PBB tahun 1993, dimana 1.235 dari 65.555 (1,8%) adalah perempuan di militer tahun 2006. Adapun pada tahun 2007 terdapat 1.034 perempuan dari 71.673 (1,7%).<sup>9</sup>

Lambatnya peningkatan partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian ini tidak terlepas dari terasosiasinya dunia militer dengan pendekatan maskulin.<sup>10</sup> Wilayah militer dianggap sebagai ruang yang lebih tepat untuk laki-laki sehingga personel militer juga didominasi oleh laki-laki. Maskulinitas

---

<sup>4</sup> United Nations, *United Nations Peacekeeping Operations Principle and Guidelines*, (New York: United Nations, 2008), hlm. 24.

<sup>5</sup> Isabelle Geuskens, “Introduction” dalam *Gender and Militarism: Analyzing the Links to Strategize for Peace*, (Den Hag: Women Peacemakers Program (WPP), Mei 24 Action Pack 2014), hlm. 3.

<sup>6</sup> United Nations, “*Women, Peace and Security*”, (United Nations Publications, 2002), hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Bishwambhar Ghimire, “Contributions and Challenges: Female Participations in UN Peacekeeping Missions”, *International Journal of*

*Humanities and Social Sciences*, USA: Center for Promoting Ideas, Vol. 7, No. 3, Maret 2017, hlm 207-213.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Irene Jung Fiala, “Unsung Heroes: Women’s Contributions in the Military and Why Their Song Goes Unsung”, dalam Hellena Carreiras dan Gerhard Kummel (ed.), *Women in the Military and in Armed Conflict*, (Wiesbaden: VS Verlag, 2008) hlm. 52.

wilayah militer ini salah satunya terbingkai dalam kegiatan misi yang disebut membutuhkan kesiapan fisik. Padahal, perempuan dalam militer juga dibutuhkan dalam rangka membangun perdamaian, memberikan akses dan dukungan kepada perempuan lokal, mendukung kebutuhan spesifik dari perempuan dan anak-anak, menggali informasi mengenai kekerasan berbasis gender serta membuat misi menjadi lebih ramah gender.<sup>11</sup> Tidak dapat diabaikan bahwa perempuan rentan menjadi korban kejahatan perang seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan sebagainya. Bahkan, menjadi hal yang ironis dimana pemerkosaan dilakukan pada saat perang secara sengaja sebagai alat dalam melemahkan lawan.<sup>12</sup> Untuk itu, perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan suatu kebutuhan.

Indonesia sendiri pertama kali mengirimkan pasukan perdamaian pada tahun 1957 ke misi *United Nations Emergency Force (UNEF)* di Mesir

sedangkan pengiriman *female peacekeeper* Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2008 ke Misi *United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)*.<sup>13</sup> Bagi Indonesia, pengiriman *female peacekeeper* ini merupakan bagian dari strategi pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan Konstitusi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkomitmen untuk ikut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia.<sup>14</sup> Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dilakukan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan berdasarkan hak dan kedudukan, serta prinsip non-intervensi terhadap urusan domestik negara lain. Terlebih, Indonesia juga memiliki visi 4.000 *peacekeepers* yang ingin dicapai dalam periode tahun 2015-2019.<sup>15</sup> Untuk itu, Indonesia melalui koordinasi Kementerian dan Lembaga (termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan,

---

<sup>11</sup> Simon Allison, "Are Women Better Peacekeepers? These UN Officers Think So", *theguardian*, 17 September 2015, dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/women-better-peacekeepers-un-officers-think-so>, diakses pada 30 April 2018.

<sup>12</sup> Andrew Heywood, "Gender in Global Politics", dalam *Global Politics*, (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 412-431.

<sup>13</sup> PMPP TNI, "TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian: Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan

Kontingen Garuda", (Jakarta: PMPP-TNI, 2011), hlm. 3.

<sup>14</sup> Kementerian Pertahanan, "*Strategi Pertahanan Negara*", (Jakarta, Edisi Tahun 2014).

<sup>15</sup> David Capie, "Indonesia as an Emerging Peacekeeping Power: Norm Revisionist or Pragmatic Provider?", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* Vol. 38, No. 1, 2016, hlm. 1-27.

dan Markas Besar TNI) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) upayanya berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi pengerahan pasukan pemelihara perdamaian dunia, termasuk dalam hal *female peacekeeper* di Lebanon Selatan.

Indonesia bergabung dalam misi UNIFIL sejak tahun 2006 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>16</sup> Berdasarkan pengerahan *female peacekeeper* di misi ini, posisi perempuan Indonesia belum banyak menempati peran yang substansial. Peran yang substansial dalam hal ini dimaksudkan pada pasukan garda terdepan seperti *Military Observer*. Faktanya, menurut salah satu *female peacekeeper* Indonesia yang pernah bertugas di Lebanon, Letkol Sus. Ratih Pusparini, pasukan perempuan lebih ditempatkan pada urusan sipil.<sup>17</sup> Posisi ini dapat ditemukan dalam bagian koordinasi sipil-militer, logistik, kesehatan, dan hubungan dengan masyarakat sipil.

Dalam perkembangannya, Indonesia turut memperhatikan target gender yang ditentukan oleh PBB dalam misi pemeliharaan perdamaian yaitu 15% untuk perempuan militer (*military observer* dan *military staff*) dan 20% untuk perempuan polisi.<sup>18</sup> Hal ini menarik dimana PBB meletakkan target 15% *female peacekeeper* dalam komponen militer namun setiap negara kontributor, termasuk Indonesia, memiliki keunikan hambatan dan tantangan tersendiri yang menyebabkan keterbatasan partisipasi perempuan. Lebih dari itu, partisipasi perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi pendukung saja seperti administrasi. Padahal, untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian, setiap negara kontributor sudah seharusnya terus berupaya meningkatkan partisipasi *female peacekeeper* dalam posisi yang menjangkau masyarakat. Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan

---

<sup>16</sup> UNIFIL, "Press Release Indonesia Joins UNIFIL", Naqoura, 11 November 2006, dalam [https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/old\\_dnn/docs/pro72\\_2.pdf](https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/docs/pro72_2.pdf), diunduh pada 10 September 2018.

<sup>17</sup> Tama Salim, "Chances rare for Indonesian women peacekeepers", *The Jakarta Post*, 28 Februari 2018, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/>

[chances-rare-for-ri-women-peacekeepers.html](#), diakses pada 26 April 2018.

<sup>18</sup> United Nations Peacekeeping, "UN Peacekeeping sets new targets for female police, military observers and staff officers", 20 September 2017, dalam <https://peacekeeping.un.org/en/un-peacekeeping-sets-new-targets-female-police-military-observers-and-staff-officers>, diakses pada 26 April 2018.

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) memiliki peran masing-masing baik secara strategis maupun operasional untuk meningkatkan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia.

Misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon dipilih dalam penelitian ini mengingat pasukan perdamaian terbesar yang dikirim Indonesia untuk sembilan misi perdamaian PBB adalah untuk misi UNIFIL. Hal ini dijustifikasi oleh Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, Ibu Grata Endah Wedaningtyas.<sup>19</sup> Terlebih, dari 41 negara kontributor pengirim pasukan pemelihara perdamaian, Indonesia adalah negara pengirim pasukan terbesar di Lebanon diikuti Italia dan India. Adapun tahun 2015 dipilih sebagai titik awal mengingat terbitnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019. Ini menjadi titik awal dalam melihat tren pengiriman *female peacekeeper* Indonesia dalam mendukung visi 4.000 personel tersebut. Sedangkan tahun 2017 dipilih sebagai titik akhir periode penelitian memperhatikan

pelaksanaan kegiatan *community outreach* yang diimplementasikan dan kali pertama dilakukannya *female patrol* dalam kerangka “*Female Assessment/Analysis and Support Team (FAST)*”. Hal ini merefleksikan komitmen UNIFIL terhadap perspektif gender di dalam misi yang dibuktikan dengan inisiatif pembentukan tim khusus pada tahun 2016. Konsentrasi ini menunjukkan *female peacekeeper* tidak bisa diabaikan begitu saja dalam diplomasi pertahanan Indonesia.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, sebagai bagian dari sistem internasional, Indonesia sudah sepatutnya meningkatkan perhatian terhadap partisipasi perempuan. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Indonesia terhadap resolusi DK PBB. Terlebih, partisipasi perempuan ini dapat menjadi salah satu aspek penting yang turut mendukung diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka memperkuat *Confidence Building Measures (CBM)* dan *capacity building female peacekeeper* Indonesia. Ini tidak terlepas dari upaya komunikasi Indonesia sehingga terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan

---

<sup>19</sup> Victor Maulana, “Indonesia Masuk 10 Besar Negara Penyumbang Pasukan Perdamaian PBB”, 22 Februari 2018, dalam <https://international.sindonews.com/read/1284306>

/40/indonesia-masuk-10-besar-negara-penyumbang-pasukan-perdamaian-pbb-1519291328, diakses pada 26 April 2018.

Keamanan PBB periode tahun 2019-2020. Terpilihnya Indonesia ini didukung oleh 114 dari total 190 negara anggota PBB. Ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia untuk menempati posisi anggota tidak tetap DK PBB yang keempat kalinya setelah menjabat pada tahun 1963-1964, 1995-1996 dan 2007-2008. Periode 2019-2020 mengungkap enam agenda utama dimana salah satunya adalah memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Agenda ini akan diupayakan melalui budaya dialog, penyelesaian konflik dengan cara damai dan tanpa kekerasan, serta meningkatkan peran perempuan dalam menjaga perdamaian di berbagai misi PBB.<sup>20</sup> Untuk itu, penelitian ini berfokus bagaimana partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 dan berlanjut pada dampaknya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Metode kualitatif, menurut

Wahyuni, yaitu pendekatan penafsiran (*interpretive*) yang terkait dengan pemahaman makna perilaku, keputusan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya di dalam dunia sosial.<sup>21</sup> Menurut Creswell, penelitian kualitatif dilakukan terhadap kondisi atau lingkungan alamiah, instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, dan proses penelitian dapat berjalan secara dinamis.<sup>22</sup> Data dan/atau informasi yang ada terkait penelitian ini terikat pada konteks dan dianalisis menggunakan teori maupun konsep dalam menjelaskan masalah penelitian. Adapun pendekatan deskriptif analitik berarti analisis berkelanjutan yang dilakukan sejak sebelum dan setelah proses pengumpulan data hingga disajikan dalam bentuk hasil penelitian.

Penelitian ini memungkinkan penggunaan triangulasi yang berarti mengambil semua atau beberapa teknik pengumpulan data. Seperti dijelaskan Raco dalam tulisannya tentang Metode Penelitian Kualitatif bahwa tidak ada cara pengumpulan data tunggal yang paling tepat atau benar-benar sempurna untuk

---

<sup>20</sup> Retno LP Marsudi, "Indonesia dan Perdamaian Dunia", 11 Juni 2018, dalam <https://kompas.id/baca/opini/2018/06/11/indonesia-dan-perdamaian-dunia/>, diakses pada 18 Juni 2018.

<sup>21</sup> Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

<sup>22</sup> Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc, 2014.

penelitian kualitatif.<sup>23</sup> Untuk itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada subyek penelitian termasuk lima *female peacekeepers*, Wakil Komandan PMPP, pejabat TKMPP, Kasi Misi Damai Kementerian Pertahanan, dan peneliti lain untuk memperkuat analisis data. Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumen baik pribadi, publik maupun bahan audiovisual.

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan metode seperti dijelaskan oleh Miles dan Huberman.<sup>24</sup> Peneliti melakukan triangulasi sumber data melalui teknik wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan yang relevan. Ini dilakukan dengan tujuan mendapat verifikasi dan kesesuaian informasi terkait masalah penelitian sehingga menjadi data yang valid dan komprehensif. Lebih lanjut juga dilakukan upaya pencarian kesesuaian dengan sumber lain baik melalui dokumen maupun literatur lainnya.

### **Partisipasi Female Peacekeeper Indonesia dalam Misi UNIFIL 2015-2017**

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL dapat dilihat dari proses penyiapan, posisi penugasan, dan kegiatan yang diikuti. Lebih lanjut, partisipasi ini dilihat melalui teori partisipasi yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff. Dari empat jenis partisipasinya (partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, kebermanfaatan dan evaluasi)<sup>25</sup>, *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 setidaknya melakukan tiga jenis partisipasi tersebut yaitu implementasi, kebermanfaatan dan evaluasi.

Secara dasar hukum, petunjuk pelaksanaan TNI tentang penyelenggaraan operasi perdamaian dunia dijelaskan dalam Peraturan Panglima TNI No. Perpang/80/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009. Proses ini antara lain melibatkan tiga aktor utama yaitu Mabes TNI, Mabes Angkatan dan PMPP TNI. Adapun perihal yang dilakukan

---

<sup>23</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

<sup>24</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A*

*Methods Sourcebook*, Third Edition, (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 294-295.

<sup>25</sup> J. Cohen dan N. Uphoff, "Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity", *World Development*, 1980, hlm. 213-235.

masing-masing pihak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Aktor dan Perihal Kegiatan Perencanaan Perekrutan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian**

<b>Mabes TNI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas kebutuhan personel dan material yang akan dikirimkan ke Misi PBB berdasarkan permintaan UN DPKO (<i>United Nations Department of Peacekeeping Operations</i>)</li> <li>- Menerbitkan direktif kepada Mabes Angkatan untuk melaksanakan seleksi daerah dan PMPP TNI untuk seleksi terpusat</li> </ul>
<b>Mabes Angkatan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan Direktif Panglima TNI</li> <li>- Menunjuk Satuan yang akan diberangkatkan</li> <li>- Merencanakan proses seleksi tingkat daerah</li> <li>- Menginventarisasi peralatan yang akan dibawa tugas</li> </ul>
<b>PMPP TNI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjabarkan Direktif Panglima TNI untuk merencanakan proses seleksi personel pada tingkat pusat.</li> </ul>

Sumber: PMPP TNI, *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian: Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*, 2011, Jakarta: PMPP-TNI, hlm. 236.

Dalam proses penyiapan, PMPP TNI melakukan program sosialisasi sebelum proses seleksi. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada satuan-satuan terkait tugas dan kewajiban yang akan diemban dalam misi. Program sosialisasi ini menjelaskan baik tentang tugas dan fungsi pasukan, evaluasi pada tahun sebelumnya dan jenis

seleksi yang akan ditempuh. Sayangnya, sosialisasi ini hanya dilakukan pada satuan tugas dari Angkatan Darat sebagai *main body* dalam Satgas Yonif Mekanis dan Satgas Kompi Zeni.<sup>26</sup> Sosialisasi tidak dilakukan secara merata untuk ketiga matr militer.

Adapun persyaratan yang ditentukan Mabes TNI bagi Wan-TNI yang akan mengikuti seleksi harus sudah memiliki pengalaman 3 tahun masa dinas untuk Bintara (diperbolehkan 1 tahun masa dinas dengan catatan prestasi tingkat nasional) dan 1 tahun untuk Perwira Karir. Selain itu, calon anggota kontingen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Lulus kesehatan fisik dan kesehatan jiwa;
- b. Mampu berbahasa Inggris sesuai dengan level pangkat/jabatan serta jenis penugasan perorangan;
- c. Lulus tes kesegaran jasmani sesuai standar TNI;
- d. Mahir mengemudi kendaraan bagi pengemudi dan personel tugas perorangan; dan
- e. Mampu mengoperasikan komputer.

Selanjutnya, dalam proses pelatihan setiap *female peacekeeper* mendapatkan

<sup>26</sup> PMPP TNI, *op.cit*, hlm. 238.

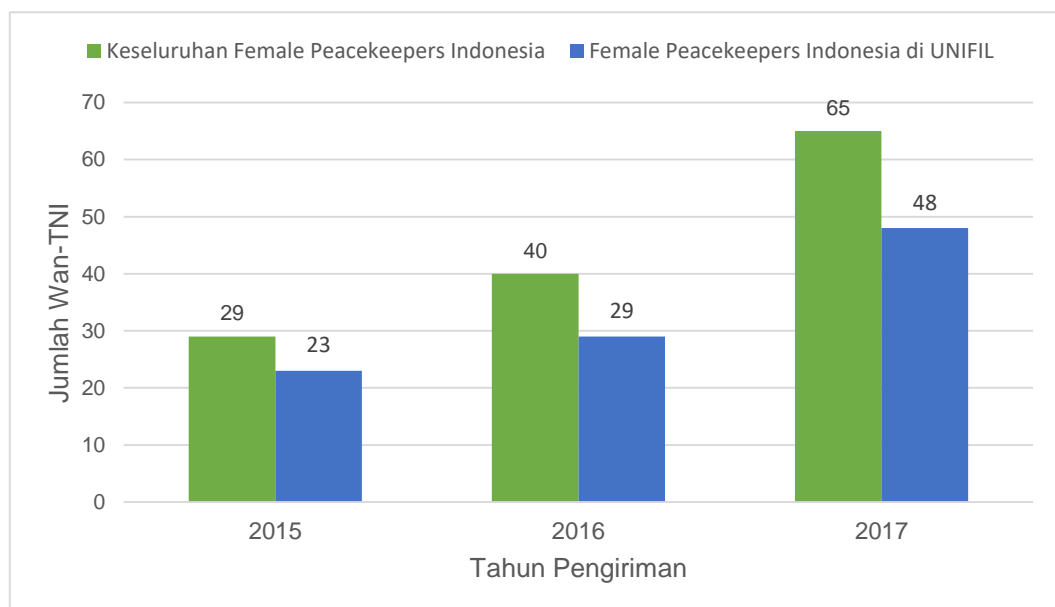
<sup>27</sup> PMPP TNI, *op.cit*. hlm. 237.

pelatihan sebagaimana personel laki-laki juga mendapat pelatihan. Diakui oleh PMPP TNI dan *female peacekeeper* sendiri bahwa mereka sama-sama menerima pembekalan, materi baik di kelas maupun di lapangan, sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan masuk dalam kelas yang sama, mendapat materi yang sama, dan mengikuti kegiatan aplikasi yang sama juga.

Setelah pelatihan selesai dilakukan, maka dipersiapkan keberangkatan menuju negara misi. Pada misi UNIFIL 2015-2017, diperoleh total 100 *female peacekeepers* Indonesia yang diberangkatkan ke Lebanon dengan grafik di bawah ini:

Melalui grafik tersebut, dapat dilihat terjadi peningkatan secara bertahap terkait jumlah *female peacekeepers* yang diberangkatkan ke misi UNIFIL. Jika dibandingkan dengan jumlah *female peacekeepers* Indonesia secara keseluruhan, grafik tersebut dapat menunjukkan bahwa lebih dari 50% *female peacekeepers* ditugaskan di UNIFIL.

Terlepas dari peningkatan tersebut, jumlah *female peacekeeper* Indonesia masih mengalami keterbatasan. Hal ini terjadi mengingat beberapa hambatan yang utamanya terkait belum maksimalnya institusi militer dalam menyiapkan *female peacekeeper*. Terasosiasinya wilayah militer dengan pendekatan maskulin masih



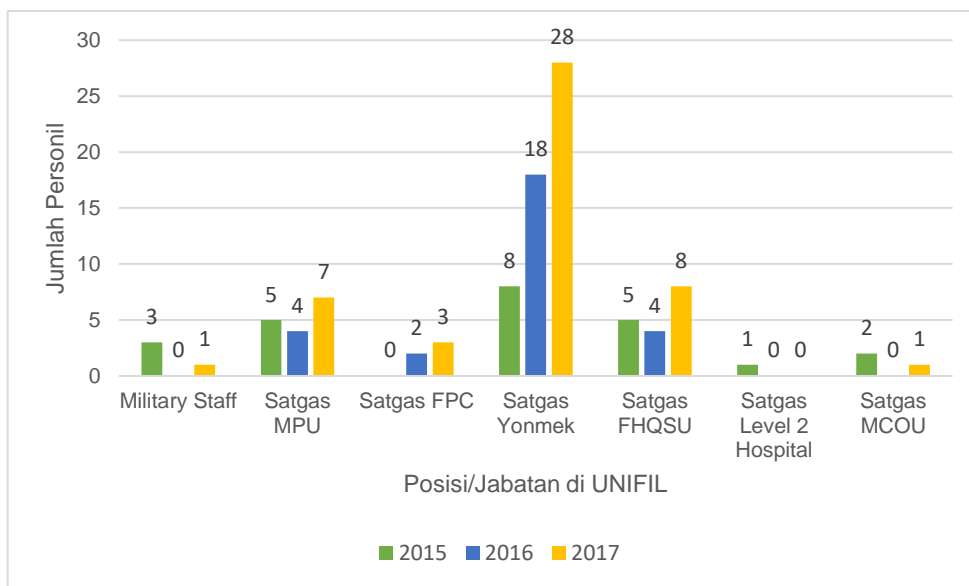
**Gambar 1. Perbandingan Jumlah *Female Peacekeepers* Indonesia secara keseluruhan dengan yang berada di UNIFIL (2015-2017)**

Sumber: Olahan Peneliti dari Data Wan-TNI di PMPP TNI per September 2018

menempatkan perempuan pada posisi

seperti administrasi. Jumlah Wan-TNI juga terbatas tidak lebih dari 4% sehingga terbentur dengan kebutuhan personel di dalam negeri.<sup>28</sup> Pengembangan karir militer mereka menjadi terhambat dengan adanya aturan mengenai izin dari suami dan/atau atasan. Terlebih, belum ada

dalam kegiatan. Posisi penugasan ini secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok penempatan tugas yaitu prajurit kontingen (*formed units or contingents*), *military observer* dan *military staff*.<sup>29</sup> Di UNIFIL sendiri, posisi yang ditempati oleh *female peacekeepers*



**Gambar 2. Posisi Female Peacekeepers Indonesia di UNIFIL (2015-2017)**

Sumber: Olahan Peneliti dari Data Wan-TNI PMPP TNI per September 2018

aturan atau kebijakan berbasis gender yang secara khusus dibuat untuk mendukung pelaksanaan *peacekeeping* dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam mengirimkan *female peacekeeper*.

Partisipasi *female peacekeeper* dalam hal implementasi dapat dilihat melalui posisi penugasan dan keterlibatannya

Indonesia berada pada Kontingen dan *Military Staff*. Khusus untuk *military observer*, terlepas dari vakumnya Indonesia mengirimkan milobs tahun 2011-2017, absennya milobs di UNIFIL disebabkan tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel sebagai pihak yang terlibat konflik.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Wawancara peneliti dengan Kasi Misi Damai, Ditstrahan Kemhan, Letkol Ikwon Achmadi di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, 9 Oktober 2018.

<sup>29</sup> United Nations, "UN Military Roles and Responsibilities", *Integrated Disarmament,*

*Demobilization and Reintegration Standards Module*, Agustus 2006, hlm. 2-3.

<sup>30</sup> Wawancara Peneliti dengan Kasisiapops Dirbinrenops PMPP TNI, Mayor Riwan Sugiyono, di Kantor PMPP Sentul, Bogor, 1 Oktober 2018.

Pada bagian kontingen, pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda (Konga). Di UNIFIL sendiri, pada tahun 2015-2017, *female peacekeepers* Indonesia menempati jabatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan misi dan mandat PBB. Jabatan tersebut antara lain:

**Tabel 2. Jabatan Penugasan Konga di UNIFIL 2015-2017**

No.	Jabatan Penugasan Konga di UNIFIL 2015-2017
1.	Satgas Yonmek (Satuan Tugas Batalyon Infantri Mekanis)
2.	FHQSU ( <i>Force Headquarter Support Unit</i> )
3.	FPC ( <i>Force Protector Company</i> )
4.	MPU ( <i>Military Police Unit</i> )
5.	MCOU ( <i>Military Community Outreach Unit</i> )
6.	Level II Hospital

Sumber: Data Wan-TNI, PMPP TNI per September 2018

Adapun sebaran komposisi penugasan *female peacekeepers* Indonesia di UNIFIL 2015-2017 mencakup beragam jabatan seperti terlihat dalam Gambar 2.

Melihat data tersebut, posisi *female peacekeepers* Indonesia di UNIFIL tahun 2015-2017 terlihat fleksibel dalam artian mengalami dinamika di setiap tahunnya. Namun, data tersebut dapat disoroti bahwa penugasan pada bagian Kontingen mendominasi keseluruhan penugasan dibandingkan pada posisi *military staff*.

Lebih lanjut, misi UNIFIL disebut memiliki keunikan tersendiri dimana

Indonesia berkontribusi mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian dengan komposisi matra baik dari angkatan darat, laut dan udara serta yang secara khusus dikirim dari Mabes TNI. Tidak seluruh misi yang diikuti oleh Indonesia memiliki komposisi pasukan dari seluruh matra tersebut. Pada tahun 2015-2017, khusus Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa komposisi angkatan darat cenderung lebih banyak daripada angkatan laut dan udara dengan perbandingan 53:16:16. Untuk melihat signifikansi jumlah *female peacekeepers* Indonesia yang ditugaskan di UNIFIL, perlu dilihat perbandingannya atau porsi *female peacekeepers* Indonesia dengan keseluruhan personel dari negara kontributor lainnya yang berkontribusi dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Persentase Female Peacekeepers Indonesia dalam Total Female Peacekeepers di UNIFIL (2015-2017)**

Keterangan \ Tahun	2015	2016	2017
Total Female Peacekeepers UNIFIL	334	408	444
Female Peacekeepers Indonesia	23	29	48
Persentase <i>female peacekeepers</i> Indonesia	6.9%	7.1%	10.8%

Sumber: Olahan Peneliti

Secara kuantitas, persentase partisipasi *female peacekeeper* Indonesia mengalami peningkatan dan ini sejalan dengan

pernyataan oleh Wakil Komandan PMPP TNI bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menambah partisipasi perempuan dalam misi perdamaian. Lebih dari itu, ini juga dikonfirmasi oleh TKMPP bahwa proses peningkatan ini tentu dilakukan secara bertahap mengingat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan perekrutan *female peacekeepers*.

Dalam implementasi periode keberangkatan 2015-2017, *female peacekeepers* Indonesia juga terlibat dalam berbagai program kegiatan sesuai dengan penugasan masing-masing. Dalam penggalian informasi terkait program kegiatan yang diikuti oleh *female peacekeepers* Indonesia ini, peneliti menyoroti setidaknya empat bidang utama kegiatan yaitu hubungan militer dan sipil (CIMIC), *military outreach*, medis, dan logistik.

Dalam bidang hubungan militer dan sipil (CIMIC/*Civil Military Cooperation*), *female peacekeepers* Indonesia memiliki peran yang baik dalam artian dapat diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini seperti disampaikan oleh Letkol Sus. Ratih Pusparini:

Perempuan pemelihara perdamaian lebih terlihat dalam hubungan diterimanya dengan masyarakat lokal. Perempuan mempunyai akses yang lebih mudah untuk melakukan pendekatan terhadap perempuan dan anak-anak di wilayah konflik, khususnya kepada korban kekerasan berbasis gender. Perempuan juga dapat memperbaiki akses dan memberikan dukungan kepada perempuan di wilayah lokal untuk memberdayakan perempuan.<sup>31</sup>

Kegiatan CIMIC dalam misi UNIFIL berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mendukung otoritas lokal dengan memperkuat hubungan antara UNIFIL dengan komunitas lokal. Hal ini ditunjukkan antara lain melalui program kegiatan perbaikan jalan, penyediaan jasa medis, dokter gigi atau dokter hewan, berbagai kursus pendidikan, peningkatan kapasitas (*capacity building*) seperti menjahit, bahasa, komputer maupun pelajaran tentang pertolongan pertama. Program ini menjadi salah satu kontribusi nyata para pemelihara perdamaian dan meninggalkan jejak positif di Lebanon Selatan.

Lebih dari itu, memperhatikan isu gender pada misi UNIFIL, pada Agustus 2016 telah terbentuk tim khusus yang

---

<sup>31</sup> Ratih Pusparini, "The Role of Women Peacekeepers in UN Peacekeeping Operations: Lesson Learned", Presentasi dalam Side Event

UNDPKO, Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34) di New York, 22 Februari 2017.

terdiri dari *female peacekeeper* baik yang berseragam maupun sipil untuk memastikan perspektif gender hadir dalam berbagai interaksi batalion dengan perempuan di dalam komunitas Lebanon Selatan. Tim khusus ini adalah *Female Assessment/Analysis and Support Team (FAST)*, yang terbentuk dengan 21 *peacekeepers* militer dan sipil lintas wilayah operasi UNIFIL. Setiap anggota tim ini dilatih dan dipanggil dari Kontingen UNIFIL untuk memberikan kehadiran perempuan dalam berbagai situasi sensitif akan budaya.<sup>32</sup>

Di dalam UNIFIL sendiri, persentase keseluruhan *female peacekeeper* berseragam hanya ada 3%, tetapi masih ada batalyon dan unit militer yang tidak memiliki personel perempuan sama sekali. FAST secara spesifik didesain untuk melawan ini dan memastikan perspektif gender dapat selalu hadir khususnya dalam isu sensitif. Adapun dua tujuan utama terbentuknya FAST yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan dalam komunitas untuk berkonsultasi dengan *female peacekeeper*

UNIFIL dan menjadikan misi UNIFIL lebih inklusif terhadap perspektif keselamatan dan keamanan.

Setelah dibentuk pada tahun 2016, kegiatan patroli pertama dilakukan pada tahun 2017. Ini dilakukan oleh 6 personel dari negara-negara yang berbeda yaitu Ghana, Irlandia, Italia, Korea Selatan, Malaysia dan Belanda.<sup>33</sup> Indonesia bukan merupakan tim dalam patroli pertama melainkan baru pada tahun 2018 mengingat adanya rotasi tim *all female patrol*. Pada patroli tersebut Indonesia bersama *female peacekeeper* dari Nepal, Serbia dan Spanyol melakukan patroli berjalan kaki dan *market walk* di Souk al Khan dengan tujuan memasukkan perspektif gender dalam aktivitas operasional misi, memberi kesempatan kepada perempuan lokal untuk lebih dekat dan nyaman bersama *peacekeeper* tanpa mengabaikan norma budaya setempat. Dengan patroli tersebut *female peacekeeper* dapat mendengar isu yang berkembang di masyarakat, pendapat mereka tentang misi, dan cerita-cerita menarik dari masyarakat lokal.

---

<sup>32</sup> UNIFIL, "New UNIFIL Initiative to Ensure Gender Perspective in Host Communities", dalam <https://unifil.unmissions.org/new-unifil-initiative-ensure-gender-perspective-host-communities>, 8 September 2016, diakses pada 9 Oktober 2018.

<sup>33</sup> Suzane Badereddine dan Zeina Ezzeddine, "UNIFIL Female Assessment/Analysis Support Team (FAST) Patrols in Rmeish", 18 Desember 2018 dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-female-assessmentanalysis-support-team-fast-patrols-rmeish>, diakses pada 30 Oktober 2018.

Hal menarik dalam program kegiatan *community outreach* di UNIFIL ini bahwa *female peacekeeper* Indonesia dipilih sebagai *spokeperson* untuk menjelaskan UNIFIL dan *Blue Line* kepada anak-anak. Pendekatan kepada anak-anak bukan merupakan hal yang mudah dimana penyampaian perlu diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan tidak membosankan. Sertu Etikasari mampu menyampaikan dengan bahasa yang lebih menyenangkan sehingga anak-anak juga turut meresponnya dengan senang dan tersenyum.<sup>34</sup> Hal ini menjadi salah satu citra *peacekeepers* Indonesia bahwa personel Indonesia adalah mereka yang ramah dan santun. Budaya ketimuran yang melekat di dalam personel ini upayanya mampu mendukung kegiatan misi menjadi lebih mudah dan komunikatif. Adapun *female peacekeeper* dari Kontingen Garuda turut berpartisipasi dalam kegiatan ini yaitu Serka Dian Rosdiana dan Eliana sebagai penerjemah.

Partisipasi *female peacekeepers* Indonesia dalam program kegiatan UNIFIL juga mencakup bidang medis dan logistik. Salah satu *female peacekeeper* yang

terlibat langsung adalah dr. Sarah yang bertugas sebagai *Chief Hygiene Officer*. Dengan jabatan ini, *female peacekeeper* Indonesia berpartisipasi langsung dalam hal menjaga sanitasi, higienitas kompon di Naqoura. Salah satu kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan yang setiap timnya diberlakukan sistem rotasi. Adapun dalam hal logistik, *female peacekeeper* Indonesia berpartisipasi dalam memberikan asistensi terkait pemenuhan kebutuhan logistik, pemantauan terkait pergerakan masuk dan keluar area UNIFIL, bekerja sama dengan unit pendukung lainnya, hingga melakukan kegiatan pelaporan.

Melalui tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh *female peacekeeper* Indonesia, jenis partisipasi selanjutnya yang relevan dengan partisipasi ini yaitu dalam hal kebermanfaatan. Berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, kebermanfaatan ini dapat dilihat antara lain secara material, sosial dan personal. Secara material, jelas bahwa *female peacekeeper* Indonesia mendapatkan manfaat dari pendapatan yang diberikan oleh PBB. Sedangkan

---

<sup>34</sup> Aoibheann O’Sullivan, ““Mr. and Mrs. Blue Barrel” Educate Young Children on Blue Line Safety”, 15 November 2017, dalam <https://unifil.unmissions.org/%E2%80%9Ccmr-and->

[mrs-blue-barrel%E2%80%9D-educate-young-children-blue-line-safety](https://unifil.unmissions.org/%E2%80%9D-educate-young-children-blue-line-safety), diakses pada 6 November 2018.

manfaat sosial yaitu berkaitan dengan kontribusi *female peacekeeper* Indonesia terhadap masyarakat seperti membantu akses kesehatan, pendidikan, dan informasi. Masyarakat lokal turut merasa terbantu dengan kehadiran para personel ini karena misalnya terkait *blue line*, anak-anak senang bermain di dekat garis tersebut dan dikhawatirkan menjadi pelanggaran terhadap resolusi DK PBB 1701. Adapun secara personal, hasil penelitian melalui wawancara dengan *female peacekeeper* Indonesia, Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, menyebutkan bahwa manfaat yang ia dapat antara lain:

- a. Mendapat kesempatan untuk menjadi duta PBB dan duta negara Republik Indonesia untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan komponen militer dan sipil baik dari Indonesia, negara lain, maupun masyarakat lokal dengan prinsip saling menghormati dan kebersamaan;
- b. Melalui tugas-tugas yang dilaksanakan, *female peacekeepers* dapat mengimplementasikan kemampuan (*skill*) yang dimilikinya dan melatih manajemen pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan budaya dan pola pikir yang berbeda dengan staf dari negara lain.

- c. Mendapat pengalaman terkait penggunaan peralatan standar PBB seperti *digital sender, intranet, outlook* dan *share point*;
- d. Menambah pengetahuan tentang mekanisme kerja dan prosedur sesuai dengan SOP yang berlaku; dan
- e. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris baik *listening, speaking* dan *writing*. Bahkan, personel juga dapat menambah pengetahuan bahasa asing lainnya seperti Bahasa Arab yang digunakan di Lebanon.

Setelah mendapat manfaat, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia turut terlihat dalam partisipasi evaluasi. Para personel turut menyampaikan hambatan dan memberikan masukan kepada institusi terkait misi pemeliharaan perdamaian yang dijalaninya. Secara garis besar, hasil penelitian menunjukkan tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan tugas. Hanya saja, untuk memulai tugas, *female peacekeeper* Indonesia memerlukan proses serah terima dan pengenalan tugas yang lebih tertata lagi mengingat hambatan rotasi jabatan yang mengakibatkan keterlambatan penempatan posisi. Dengan memperhatikan lingkungan strategis misi UNIFIL juga, personel akhirnya

memperoleh masukan seperti penambahan materi PDT tentang *environmental management*, memperkuat pemahaman terhadap MoU dan mandat PBB, menambah kontribusi Wan TNI, dan berkontribusi terhadap pemeliharaan *Indo House* di Markas Besar UNIFIL.

Partisipasi Indonesia dalam mengirimkan *female peacekeeper* sesuai dengan konsep feminis internasionalisme bahwa negara mengadopsi strategi *top-down* dalam menghadapi keterbatasan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam konsepnya, untuk memperbaiki posisi perempuan diperlukan elaborasi prinsip-prinsip dan standar transnasional.<sup>35</sup> Untuk itu, Indonesia mengambil Resolusi No. 1325 sebagai landasan terhadap urgensi pengiriman *female peacekeeper* dimana secara kuantitas Indonesia menyumbang 6-10% *female peacekeeper* di dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017.

Dalam perspektif feminisme, partisipasi perempuan dalam ranah militer merupakan hal esensial. Secara empiris bahwa keterwakilan perempuan Indonesia dalam militer tidak lebih dari 4% menandakan mis-representasi perempuan

dalam institusi. Hal ini memiliki konsekuensi logis terhadap proses pengambilan kebijakan hingga pelaksanaan yang cenderung bersifat *male-dominated*. Kurangnya representasi perempuan dalam ranah militer ini juga setidaknya menyebabkan individu di dalam institusi militer tidak terbiasa memiliki personel perempuan dengan keunikannya. Padahal, kontribusi perempuan dalam militer dan wilayah konflik sangat dibutuhkan kaitannya dengan penanganan korban berbasis gender, perempuan mantan kombatan, pendekatan terhadap masyarakat lokal, dan membuka akses bagi perempuan maupun anak-anak. Seperti yang disebutkan dalam tulisan Heywood bahwa perempuan dapat membentuk politik dunia termasuk dalam konsep keamanan dan perdamaian.<sup>36</sup>

### **Dampak Partisipasi terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia**

Dampak partisipasi *female peacekeepers* Indonesia terhadap diplomasi pertahanan Indonesia ditinjau peneliti menggunakan variabel *confidence building measures (CBM)* dan *capacity*

---

<sup>35</sup> Hillary Charlesworth, "Martha Nussbaum's Feminist Internationalism", *Ethics*, The University of Chicago Press, Vol. 111, No. 1, 2000, hlm.64-78.

<sup>36</sup> Andrew Heywood, *loc.cit.*

*building* yang diambil dari konsep diplomasi pertahanan. CBM ini sendiri lebih lanjut ditinjau melalui indikator komunikasi dalam tipologi CBM menurut Baviera (2001). Sedangkan *capacity building* ditinjau melalui indikator pelatihan.

Baviera menjelaskan bahwa penggunaan CBM saat ini lebih luas lagi tidak hanya bersifat tradisional tentang mengubah *potential adversary* dari suatu aksi militer atau serangan mendadak, tetapi juga mempromosikan komunikasi yang baik di setiap pihak khususnya dalam sektor militer. Lebih lanjut, Baviera memberikan empat wilayah CBM sebagai indikator dalam ranah multilateral yaitu komunikasi, transparansi, konsultasi, *good will*, dan *constraints*.<sup>37</sup> Komunikasi misalnya dengan adanya dialog; transparansi dengan adanya publikasi terkait pertahanan; konsultasi seperti adanya aktivitas *joint commission*; *good will* melalui penerbitan *code of conduct*, dan; *constraint* seperti adanya kesepakatan *disarmament/demilitarization*. Berdasarkan 4 area tersebut, peneliti mengambil indikator

komunikasi dalam menganalisis dampak terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

Dalam hal komunikasi, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia memberikan *bargaining position* dan *leverage* dalam pelaksanaan diplomasi. Seperti disampaikan oleh TKMPP dan PMPP TNI bahwa pengiriman personel misi pemeliharaan perdamaian tidak akan istimewa untuk PBB jika yang dikerahkan hanya personel laki-laki. PBB turut mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam hal partisipasi *female peacekeeper* ini sehingga salah satu permintaan Indonesia terkait semacam *premium rewards* terhadap pelaksanaan tugas dikabulkan oleh PBB. Ini sesuai dengan karakteristik dalam konsep diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster bahwa diplomasi pertahanan merupakan cara untuk mengejar tujuan keamanan dan luar negeri yang lebih luas melalui dukungan dari negara lain.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan konsep tersebut, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia memperoleh status anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun

---

<sup>37</sup> Aileen S.P. Baviera, "Bilateral Confidence Building with China in Relation to the South China Seas Dispute: A Philippine Perspective", Canada: Department of Foreign Affairs and International Trade, February 2001, hlm. 5.

<sup>38</sup> Andrew Cottey dan Anthony Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies, 2004), hlm. 17.

2019-2020. Hal ini dilakukan dalam rangkaian kampanye Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB sejak tahun 2016. *Female peacekeeper* Indonesia bahkan menjadi narasumber yang turut merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap perspektif gender dalam misi pemeliharaan perdamaian. Kampanye yang melibatkan *female peacekeeper* Indonesia ini salah satunya dilakukan dalam sidang, diskusi panel *Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34)* di Markas Besar PBB, New York. Hal ini sesuai dengan indikator komunikasi dalam konsep CBM, bahwa terjadi diskusi seperti di dalam forum komunikasi tersebut. Ini berdampak pada konstruksi CBM Indonesia.

Diskusi panel C-34 ini berlangsung pada 22 Februari 2017.<sup>39</sup> Dalam panel tersebut, Indonesia direpresentasikan oleh Letkol Sus. Ratih Pusparini dan AKBP Yuli Cahyanti turut mengkampanyekan partisipasi *female peacekeepers* Indonesia sebagai rekam jejak positif. Pada pertemuan tersebut, diakui oleh Letkol Sus. Ratih dan AKBP Yuli bahwa respon peserta dari negara lain begitu

menghormati Indonesia, bahkan menyampaikan kebanggaannya terhadap *female peacekeepers* Indonesia.<sup>40</sup> Melalui cerita pengalaman kedua *female peacekeepers* Indonesia ini, para peserta ikut tersentuh dengan niat baik yang menjadi pendorong mereka ikut dalam misi perdamaian. Sebagai salah satu rangkaian kampanye Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB, hal ini mempromosikan komitmen Indonesia dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan di dalam misi pemeliharaan dunia. Ini sesuai dengan salah satu indikator CBM UNODA yaitu adanya komunikasi.<sup>41</sup> Diskusi panel ini menunjukkan adanya proses komunikasi antara *female peacekeeper* yang merepresentasikan Indonesia dengan delegasi lainnya. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia, termasuk upaya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Komunikasi merupakan hal penting yang diidentifikasi Baviera dalam *confidence building measures*. Dalam konsep misi pemeliharaan dunia PBB,

---

<sup>39</sup> Tama Salim, *loc.cit.*

<sup>40</sup> Wawancara Peneliti dengan *Female Police* Indonesia, AKBP Yuli Cahyanti, di Cinere, 14 September 2018.

<sup>41</sup> UNODA, "Repository of Military Confidence-Building Measures", dalam <https://www.un.org/disarmament/cbms/repository-of-military-confidence-building-measures/>, diakses pada 13 Agustus 2018.

sistem *mandatory* berjalan dari adanya mandat DK PBB, dikomunikasikan dengan Perwakilan Tetap RI (PTRI) di New York, berlanjut kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, dikomunikasikan juga kepada Kementerian Pertahanan, sehingga berlanjut pada Mabes TNI dan secara operasional diterima oleh PMPP TNI. Dalam perkembangannya, PBB juga menggunakan sistem *pledge* dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam sistem ini, Indonesia merumuskan rencana pengerahannya yang dibahas dalam TKMPP sebagai tim khusus yang membahas cara untuk meningkatkan partisipasi dan mengantisipasi lingkungan strategis misi pemeliharaan perdamaian dunia. Setelah disepakati, usulan Indonesia disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri kepada PTRI dan berlanjut ke PBB. Untuk itu, komunikasi Indonesia dalam rangkaian diplomasi baik dalam UNDPKO dan Majelis Umum PBB adalah hal esensial untuk menyukseskan usulan Indonesia. Tanpa diplomasi, sebagai *ways to participate*, pencapaian target 4.000 *peacekeeper* akan sulit tercapai.

Untuk mencapai target 4.000 *peacekeepers*, Indonesia perlu melakukan komunikasi dengan DK PBB. Hal ini

mengingat sebaran misi pemeliharaan perdamaian yang perlu diperhatikan, misi mana saja yang dapat diikuti oleh Indonesia dan dengan komposisi berapa personel. Jejak rekam Indonesia sebagai negara dengan posisi sepuluh negara kontributor terbesar memberikan kesempatan untuk Indonesia untuk menyampaikan usulan dan keinginan untuk mengirimkan personel. PBB turut mengapresiasi hal ini mengingat Indonesia menjadi bagian dari pencapaian target 15% *female peacekeepers* dalam upaya *gender mainstreaming*.

Lebih lanjut, menurut TKMPP, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga membawa dampak positif terhadap peluang komunikasi Indonesia pada level PBB. Indonesia dianggap layak untuk dilibatkan dalam pembahasan isu gender, resolusi, dan sebagainya. Indonesia memiliki akses untuk masuk ke tataran pembahasan baik *Women, Peace and Security, Human Rights, Economy Social and Culture*, UNESCO, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan situasi perempuan yang masih minoritas di dalam misi pemeliharaan perdamaian, keberadaan *female peacekeepers* ini menjadi begitu terasa. Dengan demikian, partisipasi *female peacekeepers*

Indonesia juga terlihat di permukaan dalam setiap statistik gender PBB.

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia selanjutnya dapat ditinjau dampaknya terhadap pengembangan kapasitas (*capacity building*). *Capacity building* yang dimaksud disini adalah untuk personel atau dalam level individu seperti disebut oleh Prof. Riyadi Soeprapto dalam tingkatan *capacity building* (individu, organisasi, dan sistem).<sup>42</sup> Sejak penyiapan hingga pelaksanaan, *female peacekeeper* Indonesia mengambil manfaat injeksi pengetahuan melalui berbagai pelatihan. Hal ini turut berkontribusi terhadap pembentukan profesionalisme Wan-TNI. Bahkan, pengembangan kapasitas yang didapat oleh setiap personel ini dinilai berharga karena mampu mengimplementasikan standar operasional milik PBB. Tidak hanya itu, setiap personel juga mengambil pelajaran tentang budaya asing dan bagaimana harus bersikap dalam situasi tertentu. Ini sejalan dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 bahwa misi pemeliharaan perdamaian sebagai salah satu bentuk kerjasama pertahanan ditujukan bukan hanya untuk mencegah

konflik tetapi juga membangun kemampuan pertahanan untuk peningkatan profesionalisme TNI melalui pendidikan dan latihan. Ini juga sesuai dengan konsep *capacity building* menurut World Bank bahwa hal ini dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui pelaksanaan pelatihan (*training*). Adapun penelitian ini menemukan relevansinya dimana setiap personel menerima pelatihan sejak *pre-deployment*, *induction training*, hingga kegiatan pelatihan dari UN Agency.

Materi yang diberikan dalam PDT bisa berbeda-beda setiap tahunnya menyesuaikan dengan misi dan kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas. PMPP TNI menyebutkan *female peacekeeper* dapat mengembangkan kapasitasnya dari setiap materi yang diberikan secara teoritis maupun aplikatif. Secara teoritis, *female peacekeeper* Indonesia mendapat pengetahuan mengenai operasi pemeliharaan perdamaian dunia, peran Kontingen Garuda di dalam misi, gambaran umum tentang misi UNIFIL secara spesifik, budaya setempat, kewaspadaan terhadap ranjau, *Disarmament*, *Demobilization and*

---

<sup>42</sup> H.R. Riyadi Soeprapto, *The Capacity Building for Local Government Toward Good Governance*, Artikel

dalam Workshop Reformasi Birokrasi di Kendari, 2006, hlm.16

*Reintegration (DDR)*, prosedur evakuasi kecelakaan, negosiasi dan mediasi, pengetahuan tentang gender, HIV/AIDS, hubungan sipil-militer, dan pengetahuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan misi. Sedangkan secara aplikatif, *female peacekeeper* dapat mengembangkan kapasitasnya termasuk tentang patroli, *body checking*, kemampuan mengemudi transportasi standar PBB, menggunakan peralatan standar PBB seperti *digial sender, intranet, outlook, share point, Radio HF/VHF, Global Positioning System (GPS)* dan *Night Vision Googles (NVG)*.<sup>43</sup>

Selanjutnya, *capacity building* juga dilakukan pada saat tiba di wilayah misi yaitu *induction training*. Pelatihan ini dilakukan untuk lebih memperjelas misi dengan berbagai topik termasuk mandat, *code of conduct*, topik mengenai eksploitasi dan kekerasan seksual, tanggung jawab individu, standar operasional prosedur, hal-hal administratif, hingga hak dan kewajiban personel pemelihara perdamaian.<sup>44</sup>

Menurut Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, materi-materi yang diberikan oleh *training (J7)* tersebut menambah

pengetahuan personel baik secara individu maupun tim. Di dalam pelaksanaan tugas, materi yang telah disampaikan dapat diaktualisasikan secara langsung di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Lebih lanjut, bukan hanya tentang kemampuan *hard skill* tetapi juga *soft skill* yaitu terkait kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik secara lisan, tulisan maupun pendengaran sesuai dengan format yang berlaku di lingkungan PBB. Bahkan, berdasarkan pengalaman Mayor Laut (S/W) Nani yang juga bertugas di UNIFIL, terdapat kelas bahasa yang bisa diikuti oleh para *peacekeeper* di sela-sela waktu istirahat seperti bahasa Spanyol, Arab, Perancis dan sebagainya sehingga mampu menambah kemampuan bahasa.

Kegiatan *induction training* juga dilakukan oleh *Force Commander Civil Military Coordination (FC CIMIC) Unit* di setiap tahunnya untuk pasukan yang baru bergabung ke dalam misi. Pada tahun 2017, kegiatan ini diikuti oleh tujuh Batalyon termasuk Italia, Ghana, Finlandia-Irlandia, Malaysia, Indonesia, Spanyol dan India. Pelatihan ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pelaksanaan tugas

---

<sup>43</sup> Erna Nuraeni, "Laporan Pelaksanaan Tugas JLOC OPSSo1 UNIFIL HQ Naqoura-Lebanon", 2016, hlm. 29.

<sup>44</sup> UNMissions, "Training", dalam <https://conduct.unmissions.org/prevention-training>, diakses pada 10 November 2018.

CIMIC di UNFIL. Adapun kegiatan *market walked* secara spesifik turut memberikan pengembangan kapasitas untuk para *female peacekeeper* mengingat UNIFIL mengagendakan hal ini untuk seluruh personel perempuan secara bergantian. Pengalaman seperti ini belum tentu didapatkan oleh semua personel. Dengan demikian, *female peacekeeper* yang bergabung ke dalam misi sudah merupakan satu upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme TNI yang baik.

### **Kesimpulan**

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* tahun 2015-2017 sudah berjalan baik dimana dari segi kuantitas *female peacekeeper* Indonesia mengalami peningkatan dengan total 100 personel dari total 134 yang diberangkatkan ke sembilan misi perdamaian dunia. Angka partisipasi *female peacekeepers* Indonesia di UNIFIL ini mewakili 74.6% sebaran pasukan di seluruh misi pemeliharaan dunia yang diikuti Indonesia pada tahun 2015-2017. Namun, posisi penugasan *female peacekeeper* Indonesia masih belum ditempatkan pada posisi substansial. *Female peacekeeper* Indonesia dalam misi

UNIFIL lebih banyak ditempatkan pada posisi pendukung yaitu Satuan Tugas di dalam Kontingen daripada *military staff*.

Secara garis besar, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia masih belum maksimal dalam mendukung target 15% komposisi gender dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena terdapat hambatan dalam proses penyiapan. Hambatan tersebut utamanya berkaitan dengan kurang siapnya institusi militer dalam menyiapkan Wan-TNI termasuk kurangnya pendidikan dan pelatihan, aturan terkait ijin suami/atasan, dan absennya kebijakan. Namun, jika dibandingkan dengan kontribusi negara lain di dalam misi UNIFIL, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia ini sudah sangat baik dimana Indonesia menempati posisi negara kontributor *female peacekeeper* terbesar ketiga setelah Ghana dan Perancis.

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia berdampak meningkatkan *leverage* Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan. Partisipasi ini turut membangun *confidence building measure* Indonesia sehingga terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Lebih lanjut, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia

memperkuat *bargaining position* Indonesia dalam melakukan komunikasi dan lobi-lobi internasional dalam beberapa forum seperti Majelis Umum PBB dan UNDPKO untuk mencapai kepentingan nasional termasuk agenda pencapaian 4.000 *peacekeepers* Indonesia.

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga berdampak terhadap pengembangan kapasitas (*capacity building*) personel perempuan (Wan-TNI). Melalui pelatihan yang diikuti dan pelaksanaan tugas selama di misi, *female peacekeepers* Indonesia dapat mengembangkan kapasitas individu, kemampuan menggunakan peralatan berstandar PBB dan meningkatkan profesionalisme kerja. Secara garis besar, melibatkan perempuan dalam misi perdamaian dunia mendukung pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia yang handal untuk mencapai kepentingan nasional.

#### **Rekomendasi**

Penelitian mengenai perempuan dalam misi perdamaian masih memerlukan pengembangan. *Female peacekeepers* Indonesia sendiri tersebar ke dalam berbagai misi di dunia. UNIFIL adalah misi yang relatif aman, peneliti mengambil ini melihat tren partisipasi *female peacekeepers* Indonesia didominasi

dalam misi UNIFIL. Untuk itu, peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat meninjau misi-misi yang lebih menantang dengan melihat peran dan kontribusi perempuan di wilayah misi tersebut. Selain itu, hal ini penting agar peneliti dapat melihat peran *female peacekeepers* di dalam posisi *military observer*, urgensi pengirimannya dan manfaat bagi Indonesia.

Berdasarkan elaborasi data yang diperoleh peneliti, berikut adalah rekomendasi praktis terkait partisipasi *female peacekeeper*:

- a. Pada level strategis, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan perlu merumuskan kebijakan strategi tentang peningkatan jumlah *female peacekeeper* yang didukung dengan perspektif gender dan dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
- b. Secara operasional, melalui PMPP TNI, perlu dilakukan penguatan pelatihan terhadap *female peacekeeper* Indonesia terkait PBB sebagai *institutional knowledge* personel, tugas dan fungsi, budaya setempat, sampai kemampuan diplomasi dan komunikasi, serta *trauma healing*;

- c. Secara taktikal, perlu dipersiapkan *early training* terhadap Wan-TNI mengenai kemampuan bahasa Inggris, dan
- d. Setiap institusi/lembaga perlu mengaplikasikan perspektif gender dalam setiap kebijakannya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang ramah gender dan inklusif. Untuk itu, diperlukan *gender unit* atau *gender focal point* yang secara khusus membidangi perhatian terhadap kesetaraan gender

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Carreiras, Hellena dan Gerhard Kummel (ed.). 2008. *Women in the Military and in Armed Conflict*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Cottey, Andrew dan Anthony Forster. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies.
- Creswell, John W. 2014 *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. SAGE Publication, Inc.
- Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Isabelle Geuskens. 2014. *Gender and Militarism: Analyzing the Links to Strategize for Peace*. Den Hag: Women Peacemakers Program (WPP).
- J. R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI
- Kementerian Pertahanan. 2014. *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. “*Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*”, Third Edition, SAGE Publications, Inc.
- PMPP TNI. 2011. *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian: Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*. Jakarta: PMPP-TNI.
- Soeprapto, H.R. Riyadi. 2010. *The Capacity Building for Local Government Toward Good Governance*. World Bank
- United Nations. 2002. *Women, Peace and Security*. New York: United Nations Publication.
- United Nations. 2006. *UN Military Roles and Responsibilities, Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards Module*. United Nations Publication.
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

### Peraturan dan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019
- Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Jurnal/Artikel:**

- Baviera, Aileen S.P. 2001. "Bilateral Confidence Building with China in Relation to the South China Seas Dispute: A Philippine Perspective". *International Security Research and Outreach Programme*.
- Bishwambhar Ghimire. 2017. "Contributions and Challenges: Female Participations in UN Peacekeeping Missions". *International Journal of Humanities and Social Sciences*. USA: Center for Promoting Ideas. Vol. 7, No. 3. Maret.
- Capie, David. 2016. "Indonesia as an Emerging Peacekeeping Power: Norm Revisionist or Pragmatic Provider?". *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* Vol. 38. No. 1.
- Charlesworth, Hilary. 2000. "Martha Nussbaum's Feminist Internationalism". *Ethics*. The University of Chicago Press. Vol. 111. No. 1.
- Cohen, J. dan Uphoff N. 1980. "Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity". *World Development*. 1980.

### **Dokumen Lembaga:**

- Nuraeni, Erna. 2016. "Laporan Pelaksanaan Tugas JLOC OPSSo1 UNIFIL HQ Naqoura-Lebanon". PMPP TNI.
- UNIFIL. 2006. "Press Release Indonesia Joins UNIFIL", dalam [https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/old\\_dnn/docs/pro72\\_2.pdf](https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/docs/pro72_2.pdf), diunduh pada 10 September 2018.
- United Nations Security Council. 2000. "Resolution 1325 (2000): Women, Peace and Security". No. S/RES/1325.
- United Nations. 2008. "United Nations Peacekeeping Operations Principle and Guidelines". New York: United Nations.

### **Internet/Website:**

- Allison, Simon. 2015. "Are Women Better Peacekeepers? These UN Officers Think So". *The Guardian*. dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/women-better-peacekeepers-un-officers-think-so>, diakses pada 30 April 2018.
- Badereddine, Suzane dan Zeina Ezzeddine. 2018. "UNIFIL Female Assessment/Analysis Support Team (FAST) Patrols in Rmeish". dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-female-assessmentanalysis-support-team-fast-patrols-rmeish>, diakses pada 30 Oktober 2018.
- Marsudi, Retno LP. 2018. "Indonesia dan Perdamaian Dunia", dalam <https://kompas.id/baca/opini/2018/06/11/indonesia-dan-perdamaian-dunia/>, diakses pada 18 Juni 2018.
- Maulana, Victor. 2018. "Indonesia Masuk 10 Besar Negara Penyumbang Pasukan Perdamaian PBB". dalam <https://international.sindonews.com/read/1284306/40/indonesia-masuk-10-besar-negara-penyumbang-pasukan-perdamaian-pbb-1519291328>, diakses pada 26 April 2018.
- O'Sullivan, Aoibheann. 2017. "Mr. and Mrs. Blue Barrel" Educate Young Children on Blue Line Safety". dalam <https://unifil.unmissions.org/%E2%80%9Cmr-and-mrs-blue-barrel%E2%80%9D-educate-young-children-blue-line-safety>, diakses pada 6 November 2018.
- Salim, Tama. 2018. Chances rare for Indonesian women

- peacekeepers”. The Jakarta Post. dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/chances-rare-for-rif-women-peacekeepers.html>, diakses pada 26 April 2018.
- UNIFIL. 2016. “New UNIFIL Initiative to Ensure Gender Perspective in Host Communities”. dalam <https://unifil.unmissions.org/new-unifil-initiative-ensure-gender-perspective-host-communities>, diakses pada 9 Oktober 2018.
- UNIFIL. 2018. Advancing Women Peacekeepers Role in UNIFIL. dalam <https://unifil.unmissions.org/advancing-women-peacekeepers-role-unifil>, diakses pada 15 November 2018.
- United Nations Peacekeeping. 2017. “UN Peacekeeping sets new targets for female police, military observers and staff officers”. dalam <https://peacekeeping.un.org/en/un-peacekeeping-sets-new-targets-female-police-military-observers-and-staff-officers>. diakses pada 26 April 2018.
- UNMissions. 2018. “Training”. dalam <https://conduct.unmissions.org/prevention-training>, diakses pada 10 November 2018.
- UNODA, “Repository of Military Confidence-Building Measures”, dalam <https://www.un.org/disarmament/cbms/repository-of-military-confidence-building-measures/>, diakses pada 13 Agustus 2018.
- for Peacekeeping Operations (C-34), New York.

**Sumber Lain:**

- Pusparini, Ratih. 2017. “The Role of Women Peacekeepers in UN Peacekeeping Operations: Lesson Learned”, Presentasi dalam Side Event UNDPKO, Special Committee